**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang‐Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah, sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. **Dasar Hukum**
2. Undang‐undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
   1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
   2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
   3. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
   4. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Perturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2017 dan perubahannya melalui Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
   5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700/155/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
   6. Keputusan Kepala Dinas Nomor 065/1210/Sekr-2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
3. **Maksud dan Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini adalah sebagai dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan SKPD yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

1. **Ruang Lingkup**

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan‐kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat SKPD yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran di unit kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2018.

**BAB II**

**SEKILAS TENTANG SPIP**

1. **Pengertian**

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang‐undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari‐hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, menjamin tersedianya laporan manajerial yang andal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati‐hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

1. **Tujuan SPIP**

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang‐undangan.

1. **Unsur‐unsur SPIP**

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur‐unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

* 1. **Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kuncikeberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang‐ orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

* 1. **Penilaian Risiko**

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati‐hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

* 1. **Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk mencapai tujuan‐tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakterisitik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sekurang‐kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian :

1. Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
2. Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
3. Disesuaikan dengan sifat khusus SKPD;
4. Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur secara tertulis;
5. Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan; dan
6. Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.
   1. **Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung‐jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung‐jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

* 1. **Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan‐perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

1. **Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehandaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauhmana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

**BAB III**

**PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

1. **Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik**

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur‐unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, bertujuan untuk:

* + 1. Tegaknya integritas dan nilai‐nilai etika;
    2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
    3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
    4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
    5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
    6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
    7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
    8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

1. **Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini**

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diperoleh gambaran sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Sub Unsur** | **Kondisi** |
| 1 | Penegakan Integritas dan Nilai Etika | Cukup Memadai |
| 2 | Komitmen terhadap Kompetensi | Cukup Memadai |
| 3 | Kepemimpinan yang Kondusif | Cukup Memadai |
| 4 | Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan | Memadai |
| 5 | Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat | Cukup Memadai |
| 6 | Kebijakan Pengembangan SDM | Cukup Memadai |
| 7 | Pengawasan Internal yang Efektif | Cukup Memadai |
| 8 | Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi | Cukup Memadai |

1. **Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian**

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah‐langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:







**BAB IV**

**RESIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN**

1. **Pernyataan Tujuan**

Penyelenggaran SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organanisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2017 rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diprioritaskan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produktivitas dan Pengelolaan Hasil Hutan Lestari
2. Meningkatkan Kemampuan Hutan dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
5. **Risiko-risiko**

Berdasarkaan hasil penilaian resiko yang mengancam pencapain tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani. Risiko-risiko dimaksud meiluti risiko yang terindentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh oihak auditor dan risiko yang terindentifikasi melalui diskusi manajamen yaitu :

**Risiko atas pencapaian Tujuan 1:**

1. Penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan pemeliharaan batas kawasan hutan.
2. Hilangnya tanda-tanda batas hasil tata batas definitif kawasan hutan.
3. Keterbatasan SDM pengukuran dan pemetaan kawasan sebagai pelaksana kegiatan pemeliharaan batas kawasan hutan.
4. Arsip dokumen tata hutan dan perencanaan hutan kurang lengkap.
5. Keterbatasan SDM dalam memahami dokumen tata hutan dan perencanaan hutan.
6. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan.
7. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal.
8. Kurangnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan monitoring dan pembinaan.
9. Jumlah personil yang terbatas dan tidak sesuai penempatannya akan dapat meghambat dalam melakukan pelaksanaan di lapangan.
10. Fasilitas penunjang yang belum memadai (personil, ruangan mapun dana) dapat menghambat proses monitoring pengembangan industri hutan primer hasil hutan kayu, hutan alam dan hutan tanaman.
11. Terbatasnya kemampuan personil dalam memahami Peraturan-peraturan dapat menghambat proses pengawasan pengembangan industri hutan primer hasil hutan kayu, hutan alam dan hutan tanaman di Provinsi Sumatera Barat.
12. Pelaksanaan *cross* *check* Titik Panas tidak optimal
13. Patroli kebakaran hutan yang tidak tepat sasaran
14. Frekuensi kejadian kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
15. Tidak maksimalnya pelaksanaan patroli dan operasi pengamaman hutan, intelijen dan penyelesaian kasus, karena adanya keterlibatan oknum baik dari dalam maupun dari luar yang mengakibatkan bocornya informasi dan perlawanan masyarakat.
16. Keterbatasan SDM Polisi Kehutanan dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
17. Jumlah Satgas PHBN yang ada tidak mampu melakukan upaya pencegahan kerusakan hutan di wilayahnya masing-masing dan menjadi motor penggerak dalam upaya perlindungan hutan.
18. Tidak meratanya kemampuan SDM satgas PHBN tentang pengetahuan kehutanan dan upaya perlindungan hutan.
19. Tidak semua *stakeholder* dan lapisan masyarakat dapat dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah.
20. Terbatasnya Jumlah personil identifikasi dan inventarisasi yang berkompeten.
21. Penolakan msayarakat dan *stakeholder* terkait dalam usulan pembentukan lokasi menjadi kawasan ekosistem esensial.
22. Konflik kepentingan dalam masyarakat dan *stakeholder* terkait pengelolaan ekosistem esensial yang memiliki potensi komersial cukup tinggi.
23. Kurang pemahaman personil yang melaksanakan Monev dan Pembinaan tentang Pengelolaan Ekosistem Esensial.
24. Tidak terpadunya pengelolaan kawasan eksosistem esensial oleh masing-masing *stakeholder*.
25. Kurangnya tindak lanjut hasil pelaksanaan monev pengelolaan kawasan Ekosistem Esensial oleh masing-masing *stakeholder.*
26. Kondisi topografi dan lokasi yang sulit dijangkau oleh tim untuk dilakukan identifikasi dengan keterbatasan waktu dan sarana pendukung identifikasi.
27. Tidak semua *stakeholder* dan lapisan masyarakat dapat dilakukan sosialisasi bahaya kerusakan hutan.
28. Luas tanaman tahun 2013 kategori berhasil kurang dari 4.300 ha (< 0,67%).
29. Pelaksanaan evaluasi di lapangan tidak lancar/terlambat.
30. Tidak tersedianya data/peta lokasi tanaman tahun 2013 di Kabupaten/Kota.
31. Peraturan perundang-undangan berubah (baru).
32. Sarana dan prasarana tidak memadai
33. Keterbatasan/standar harga/upah yang lebih kecil dibandingkan realitas di lapangan.
34. Tidak terkendalinya pengelolaan DAS di masyarakat.
35. Kurang akuratnya penanganan data.
36. Kemungkinan *overlap* kegiatan dengan UPT Kementerian

**Risiko atas pencapaian Tujuan 2:**

1. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam menjaga keberlanjutan Petak Ukur Permanen (PUP).
2. Keterbatasan SDM/ Kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan
3. Kemungkinan ketidakcermatan petugas pelaksana kegiatan dalam pengambilan sampel pembuatan PUP.
4. Kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dalam pembuatan PUP
5. Keterbatasan jumlah kendaraan dinas.
6. Kesulitan dalam memperoleh data sekunder pelaksanaan kegiatan sesuai SRAP REDD+.
7. Kesulitan dalam menemukan lokasi kegiatan di kabupaten/kota untuk melakukan *Cross Check* kegiatan.
8. Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan kegiatan
9. Kendala dalam koordinasi dengan pejabat terkait di Kabupaten/Kota.
10. Keterbatasan sarana pendukung kegiatan.
11. Tidak tersedianya bibit sesuai dengan rencana.
12. Tidak terdistribusinya bibit sesuai dengan yang direncanakan.
13. Bibit tidak ditanam pada lokasi lahan kritis.
14. Kualitas bibit yang didistribusikan rendah.
15. Belum tersedianya SDM yang berkompeten dalam hal pembuatan bibit/benih tanaman hutan.
16. Pengada/pengedar bibit tidak berada di tempat/ di lokasi saat dilakukan monitoring, penilaian lapangan dan sertifikasi mutu bibit.
17. Pengada/pengedar tidak menyampaikan laporan produksi dan peredaran bibit.
18. Penilai lapangan dalam rangka penetapan pengada/pengedar tidak dapat dilaksanakan.
19. Sertifikasi mutu bibit tidak dapat dilaksanakan.
20. Jumlah ketersedian keragaman jenis materi genetik berkurang.
21. Kemampuan SDM terbatas dalam jumlah dan pemahaman peraturan-peraturan konservasi sumber daya genetic.
22. Sumber dana terbatas.
23. Akses dan lokasi sulit dijangkau.

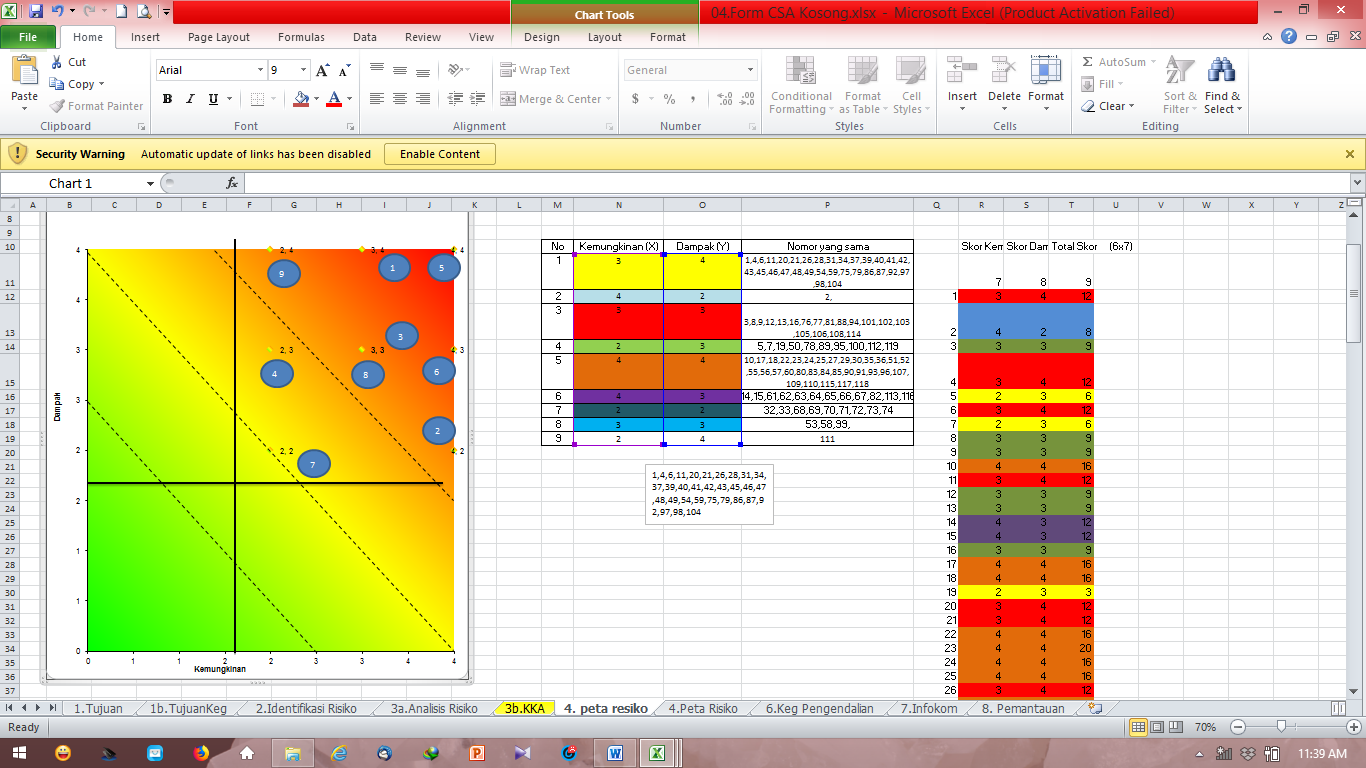
**Risiko atas pencapaian Tujuan 3 :**

1. Peserta tidak hadir
2. Peserta bukan pengelola HKm, HN, HTR, dan HRK
3. Keterbatasan pendanaan
4. Salah pengertian/persepsi masyarakat
5. Penolakan/klaim masyarakat
6. Propaganda pihak yang tidak setuju
7. Keterbatasan SDM fasilitator/pendamping
8. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang

**Risiko atas pencapaian Tujuan 4 :**

1. Jumlah personil yang memahami perencanaan dan penganggaran terbatas sehingga dapat menghambat proses perencanaan, penganggaran dan monev yang cermat, tepat dan sesuai dengan tata waktu.
2. Fasilitas penunjang yang belum memadai dapat menghambat proses perencanaan, penganggaran dan monev yang cermat, tepat dan sesuai dengan tata waktu.
3. Terlambat memperoleh data/ SPJ untuk penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan.
4. Laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Masih rendahnya pemahaman tenaga perencana, korwil/ KPH tentang penyusunan program kegiatan sesuai dokumen perencana.
6. Rendahnya kesadaran dan pemahaman instansi terkait/ pemuka masyarakat terhadap pentingnya koordinasi dan sinkronisasi program anggaran kegiatan
7. Rendahnya pemahaman ASN terhadap ISO dan SPIP
8. Rendahnya kepedulian ASN terhadap ISO dan SPIP
9. Tarif honorarium ada perubahan setelah DPA disahkan, adanya perubahan dan penambahan personil eselon III/IV dan bendahara pengeluaran pembantu dalam Surat Keputusan Kepada Dinas terkait dengan pembayaran honornya.

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :





1. **Kegiatan Pengendalian Terpasang**

Sejauh ini dalam mengendalikan risiko, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai efektif namun beberapa lainnya dinilai kurang efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa pengendalian yang telah ada atau yang telah terpasang sebagai berikut:

1. Melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Peta kerja mengacu kepada peta hasil tata batas definitif kawasan hutan.
3. Melibatkan pelaksana yang memenuhi kriteria dari bidang lain.
4. Melakukan penataan kembali arsip data yang ada di Seksi PTH.
5. Melakukan *coaching* sebelum pelaksanaan kegiatan.
6. Mengikuti peraturan yang berlaku dengan melaksanakan prosedur RHL di luar kawasan hutan (mekanisme hibah).
7. Mengusulkan pengadaan jenis tanaman sesuai dana yang tersedia.
8. Mengusulkan staf untuk mengikuti pelatihan pengukuran.
9. Mengusulkan agar diizinkan memakai kendaraan pribadi dalam pelaksanaan kegiatan ke lapangan.
10. Melakukan evaluasi tanaman tahun 2013 lebih dari luasan yang ditargetkan.
11. Mengikutsertakan staf/anggota masyarakat yang mengenal lokasi penanaman, mempergunakan GPS dalam penentuan titik-titik koordinat di lapangan.
12. Pemanfaatan personil dan sarana operasional yang ada.
13. Mengambil patokan data dari wali data di wilayah masing-masing.
14. Menggunakan aturan yang ada dengan tetap berkoordinasi dengan instansi vertikal.
15. Koordinasi dengan pemuka masyarakat dan LPHM.
16. Menugaskan personil yang dianggap mampu secara fisik dan teknis.
17. Menyediakan obat-obatan dan minta tenaga pendamping lokasi.
18. Menyewakan kendaraan rental meski tidak dianggarkan.
19. Mengumpulkan data dari bidang terkait dan kabupaten/kota.
20. Memaksimalkan personil yang ada dan melakukan *coaching.*
21. Melakukan koordinasi intensif dengan pejabat terkait.
22. Menyewa kendaraan rental meski tidak dianggarkan.
23. Menginformasikan kepada pengada/pengedar tentang jadwal monitoring, penilaian lapangan dan sertifikasi mutu bibit.
24. Membuat surat edaran kepada pengada/pengedar tentang kewajiban membuat laporan produksi dan peredaran bibit yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan.
25. Menginformasikan via telepon tentang pesyaratan untuk menjadi pengada/pengedar bibit terdaftar di lingkup Provinsi Sumatera Barat.
26. Menginformasikan via telepon tentang persyaratan untuk sertifikasi mutu bibit di lingkup Provinsi Sumatera Barat.
27. Pengamanan dan perlindungan hutan.
28. Melalui pelaksanaan tugas konservasi sumber daya genetik.
29. Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya genetik.
30. Ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga penyuluh kehutanan
31. Mengirim undangan
32. Memberikan arahan teknis pelaksana
33. Komunikasi lisan dengan sekretaris Dinas Kehutanan.
34. Masih terbatasnya kemampuan personil operasional dalam memahami dokumen perencanaan.
35. Melakukan komunikasi awal mengenai koordinasi dan sinkronisasi kegiatan melalui telepon.
36. Mengingatkan ke bidang-bidang sebelum batas akhir tanggal pengumpulan SPJ/data.
37. Mengikuti bimtek penyusunan laporan bagi pembuat laporan
38. Melakukan penelaahan terhadap setiap undangan bimtek perencanaan, anggaran dan monev dan jika dana tersedia mengirim aparatur untuk mengikuti bimtek.
39. Pemanfaatan sarana operasional sesuai kebutuhan.
40. Kurangnya sosialisasi pentingnya data kehutanan sebagai data base perencanaan kehutanan.
41. Melakukan pengumpulan data ke Bidang dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
42. SDM harus memahami dan mengetahui standar terbaru yang dipakai dan membuat usulan perubahan anggaran terkait adanya perubahan dan penambahan personil eselon III/IV dan bendahara pengeluaran pembantu.
43. **Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan**

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang sudah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Beberapa kegiatan pengendalian yang perlu ditingkatkan dan dibangun antara lain:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risiko | | Pengendalian yang masih dibutuhkan |
| Tujuan 1 : Meningkatnya produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari | | |
| 1. | Penolakan masyarakat terhadap pelaksanaan pemeliharaan batas kawasan hutan | Melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan |
| 2. | Hilangnya tanda-tanda batas hasil tata batas definitif kawasan hutan | Peta kerja mengacu kepada peta hasil tata batas definitif kawasan hutan |
| 3. | Keterbatasan SDM pengukuran dan pemetaan kawasan sebagai pelaksana kegiatan pemeliharaan batas kawasan hutan | Melibatkan pelaksana yang memenuhi kriteria dari bidang lain |
| 4. | Arsip dokumen tata hutan dan perencanaan hutan kurang lengkap | Melakukan penataan kembali arsip data yang ada di Seksi PTH |
| 5. | Keterbatasan SDM dalam memahami dokumen tata hutan dan perencanaan hutan | Melakukan *coaching* sebelum pelaksanaan kegiatan |
| 6. | Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal | Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada bulan berikutnya |
| 7. | Kurangnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan monitoring dan pembinaan | Membuat telaah staf untuk mengusulkan tambahan dana untuk penganggaran tahun berikutnya. |
| 8. | Kurangnya pemahaman terhadap peraturan | * Melakukan sosialisasi internal unit kerja setiap ada peraturan baru. * Mengikuti peraturan yang berlaku dengan melaksanakan prosedur RHL di luar kawasan hutan (mekanisme hibah). |
| 9. | Jumlah personil yang terbatas dan tidak sesuai penempatannya akan dapat meghambat dalam melakukan pelaksanaan di lapangan | * Memanfaatkan personil yang ada atau mellibatkan bidang lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan melalui surat permohonan personel oleh Kabid/KaUPTD. * Melibatkan masyarakat. |
| 10. | Fasilitas penunjang yang belum memadai (personil, ruangan mapun dana) dapat menghambat proses monitoring pengembangan industri hutan primer hasil hutan kayu, hutan alam dan hutan tanaman | Mengusulkan agar fasilitas dilengkapi sesuai kebutuhan dalam anggaran |
| 11. | Terbatasnya kemampuan personil dalam memahami Peraturan Perundang-undangan dapat menghambat proses pengawasan pengembangan industri hutan primer hasil hutan kayu,hutan alam dan hutan tanaman di Provinsi Sumatera Barat | Pemanfaatan personil dan sarana operasional yang ada |
| 12. | Pelaksanaan *cross* *check* Titik Panas tidak optimal | Mengambil patokan data dari walidata di wilayah masing-masing |
| 13. | Patroli kebakaran hutan yang tidak tepat sasaran | Menggunakan aturan yang ada dengan tetap berkoordinasi dengan instansi vertikal. |
| 14. | Frekuensi kejadian kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat | Koordinasi dengan pemuka masyarakat dan LPHM |
| 15. | Tidak maksimalnya pelaksanaan patroli dan operasi pengamanan hutan, intelijen dan penyelesaian kasus, karena adanya keterlibatan oknum baik dari dalam maupun dari luar yang mengakibatkan bocornya informasi dan perlawanan masyarakat. | Menugaskan personil yang dianggap mampu secara fisik dan teknis |
| 16. | Keterbatasan SDM Polisi Kehutanan dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan. | Melakukan *coaching* kepada tim sebelum pelaksanaan kegiatan. |
| 17. | Jumlah Satgas PHBN yang ada tidak mampu melakukan upaya pencegahan kerusakan hutan di wilayahnya masing-masing dan menjadi motor penggerak dalam upaya perlindungan hutan | Melakukan penyadar tahuan tentang pentingnya pencegahan kerusakan hutan terhadap masyarakat dan PPHBN |
| 18. | Tidak meratanya kemampuan SDM satgas PHBN tentang pengetahuan kehutanan dan upaya perlindungan hutan | Melakukan bimtek, seminar atau sosialisasi untuk menambah pengetahuan satgas PPHBN untuk melakukan perlindungan hutan |
| 19. | Tidak semua *stakeholder* dan lapisan masyarakat dapat dilakukan sosialisasi Peraturan Daerah | Mengusulkan agar setiap lapisan masyarakat diundang untuk sosialisasi Peraturan Daerah |
| 20. | Terbatasnya Jumlah personil identifikasi dan inventarisasi yang berkompeten | * Mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan identifikasi dan inventarisasi hutan. * Mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan yang dibutuhkan. |
| 21. | Penolakan masayarakat dan *stakeholder* terkait dalam usulan pembentukan lokasi menjadi kawasan ekosistem esensial | Melakukan pendekatan personal terhadap pemuka masyarakat agar memahami esensi dan manfaat pengelolaan ekosistem esensial |
| 22. | Konflik kepentingan dalam masyarakat dan *stak holder* terkait pengelolaan ekosistem esensial yang memiliki potensi komersial cukup tinggi | Melakukan koordinasi intensif dengan pejabat terkait |
| 23. | Kurang pemahaman personil yang melaksanakan Monev dan Pembinaan tentang Pengelolaan Ekosistem Esensial | Mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan Monev dan Pembinaan tentang Pengelolaan Ekosistem Esensial |
| 24. | Tidak terpadunya pengelolaan kawasan eksosistem esensial oleh masing-masing *stakeholder* | Melibatkan masyarakat dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan, membentuk pokja, forum pengelola ekosistem esensial |
| 25. | Kurangnya tindak lanjut hasil pelaksanaan monev pengelolaan kawasan ekosistem esensial oleh masing-masing *stakeholder* | Mewajibkan pengelola ekosistem esensial untuk membuat laporan monev pengelolaan ekosistem esensial |
| 26. | Kondisi topografi dan lokasi yang sulit dijangkau oleh tim untuk dilakukan identifikasi dengan keterbatasan waktu dan sarana pendukung indentifikasi | Melibatkan masyarakat setempat yang mengetahui lokasi untuk mempermudah mencari akses jalan yang lebih mudah dijangkau. |
| 27. | Tidak semua *stakeholder* dan lapisan masyarakat dapat dilakukan sosialisasi bahaya kerusakan hutan | Melakukan sosialisasi dengan mempertimbangkan keterwakilan *stakeholder* mengenai bahaya kerusakan hutan |
| 28. | Luas tanaman tahun 2013 kategori berhasil kurang dari 4.300 ha (< 0,67%) | Melakukan pembinaan RHL agar keberhasilan tanaman selanjutnya meningkat. |
| 29. | Pelaksanaan evaluasi di lapangan tidak lancar/ terlambat | Melakukan perbaikan perencanaan sehingga jadwal evaluasi dapat dilakukan lebih awal. Memanfaatkan masyarakat dan personil yang ada. |
| 30. | Tidak tersedianya data/ peta lokasi tanaman tahun 2013 di Kabupaten/ Kota | Melakukan pemetaan kembali yang merupakan monev hasil penanaman tahun 2013. Melakukan wawancara terhadap pemuka masyarakat, masyarakat yang mengetahui kegiatan tersebut. |
| 31. | Peraturan perundang-undangan berubah (baru) | * Melakukan pengkinian informasi peraturan perUU setiap ada aturan baru * Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan internal dan melakukan perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan baru. |
| 32. | Keterbatasan dana yang tersedia | Membuat telaah staf untuk mengusulkan dana sesuai kebutuhan |
| 33. | Keterbatasan SDM | * Melibatkan personel bidang lain dan masyarakat setempat. * Pemanfaatan personil dan sarana operasional yang ada |
| 34. | Sarana dan prasarana tidak memadai | Mengusulkan melengkapi sarpras sesuai kebutuhan dan kebijakan anggaran |
| 35. | Keterbatasan/ standar harga/ upah yang lebih kecil dibandingkan realitas dilapangan | Diusulkan di standar biaya untuk menyesuaikan upah buruh |
| 36. | Tidak terkendalinya pengelolaan DAS di Masyarakat | Melakukan sosialisasi ke masyarakat, instansi terkait akan pentingnya pengelolaan DAS |
| 37. | Kurang akuratnya penanganan data | Melakukan penyimpanan data sesuai SOP |
| Tujuan 2 : Meningkatkan Kemampuan Hutan Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya | | |
| 1. | Masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam menjaga keberlanjutan PUP | Mengumpulkan data dari bidang terkait dan Kab/ Kota |
| 2. | Keterbatasan SDM/ kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan | Berkoordinasi dengan pejabat terkait |
| 3. | Kemungkinan ketidakcermatan petugas pelaksana kegiatan dalam pengambilan sampel pembuatan PUP | Memaksimalkan personil yang ada dan melakukan *coaching* |
| 4. | Kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dalam pembuatan PUP | Menyediakan obat-obatan dalam melakukan kegiatan |
| 5. | Keterbatasan jumlah kendaraan dinas | Menyewa kendaraan rental meski tidak dianggarkan |
| 6. | Kesulitan dalam memperoleh data sekunder pelaksanaan kegiatan sesuai SRAP REDD+ | Melakukan koordinasi intensif dengan pejabat terkait/wali data |
| 7. | Kesulitan dalam menemukan lokasi kegiatan dikabupaten/kota untuk melakukan Cross Check kegiatan | Berkoordinasi dengan pejabat terkait/masyarakat |
| 8. | Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan kegiatan | Memaksimalkan personil yang ada dan melakukan *coaching* |
| 9. | Kendala dalam koordinasi dengan pejabat terkait di Kabupaten/ Kota | Melakukan koordinasi intensif dengan pejabat terkait |
| 10. | Keterbatasan sarana pendukung kegiatan | Mengusulkan pengadaan sarpras pendukung kegiatan |
| 11. | Tidak tersedianya bibit sesuai dengan rencana | Melakukan perubahan jenis bibit sesuai bibit yang tersedia |
| 12. | Tidak terdistribusinya bibit sesuai dengan yang direncanakan | Membuat laporan pendistribusian bibit dan alasan tidak sesuai rencana |
| 13. | Bibit tidak ditanam pada lokasi lahan kritis | Membuat laporan alasan tidak ditanam pada lahan kritis dan tahun depan agar direncanakan pada lahan kritis |
| 14. | Kualitas bibit yang didistribusikan rendah | Meningkatkan mekanisme informasi pendistribusian bibit sehingga penerima manfaat lebih mudah memahami mekanisme permintaan bibit |
| 15. | Belum tersedianya SDM yang berkompeten dalam hal pembuatan bibit/benih tanaman hutan | Mengirim aparatur mengikuti diklat |
| 16. | Pengada/ pengedar bibit tidak berada ditempat/ dilokasi saat dilakukan monitoring, penilaian lapangan dan sertifikasi mutu bibit | Menginformasikan kepada pengada/ pengedar tentang jadwal monitoring, penilaian lapangan dan sertifikasi mutu bibit |
| 17. | Pengada/ pengedar tidak menyampaikan laporan produksi dan peredaran bibit | membuat surat edaran kepada pengada/ pengedar tentang kewajiban membuat laporan produksi dan peredaran bibit yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan |
| 18. | Penilai lapangan dalam rangka penetapan pengada/ pengedar tidak dapat dilaksanakan | Menginformasikan via telepon tentang pesyaratan untuk menjadi pengada/ pengedar bibit terdaftar di lingkup Provinsi Sumatera Barat |
| 19. | Sertifikasi mutu bibit tidak dapat dilaksanakan | Menginformasikan via telepon tentang persyaratan untuk sertifikasi mutu bibit dilingkup Provinsi Sumatera Barat |
| 20. | Jumlah ketersedian keragaman jenis materi genetik berkurang | Melakukan konservasi sumber daya genetik untuk sub kegiatan |
| 21. | Kemampuan SDM terbatas dalam jumlah dan pemahaman peraturan-peraturan konservasi sumber daya genetik. | Mengirimkan staf terkait untuk mengikuti pelatihan |
| 22. | Sumber dana terbatas | Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya genetik |
| 23. | Akses dan lokasi sulit dijangkau | Melibatkan masyarakat setempat dan penyuluh kehutanan yang sudah memahami medan |
| Tujuan 3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan | | |
| 1. | Peserta tidak hadir | Menugaskan personil yang dianggap mampu secara fisik dan teknis |
| 2. | Peserta bukan pengelo HKm, HN, HTR, dan HRK | Koordinasi dengan pemuka masyarakat dan LPHM |
| 3. | Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang | Memanfaatkan sarpras yang ada dan mengusulkan pengadaan sarpras jika memungkinkan |
| 4. | Keterbatasan pendanaan | Koordinasi dengan pihak lain yang berkepentingan seperti NGO |
| 5. | Salah pengertian/persepsi masyarakat | Melakukan *coaching* kepada tim sebelum pelaksanaan kegiatan untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat |
| 6. | Penolakan/klaim masyarakat | Koordinasi dengan pemuka masyarakat dan LPHM |
| 7. | Propaganda pihak yang tidak setuju | Koordinasi dengan pemuka masyarakat dan LPHM |
| 8. | Keterbatasan SDM fasilitator/pendamping | * Memberikan pelatihan singkat bagi para fasilitator/pendamping. * Menggunakan SDM yang ada dengan meningkatkan kapasitasnya |
| Tujuan 4: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. | | |
| 1. | Jumlah personil yang memahami perencanaan dan penganggaran terbatas sehingga dapat menghambat proses perencanaan, penganggaran dan monev yang cermat, tepat dan sesuai dengan tata waktu | * Mengikutsertakan staf perencana mengikuti diklat perencanaan. * Mengirim staf subag program untuk mengikuti bimtek monev jika ada. |
| 2. | Fasilitas penunjang yang belum memadai dapat menghambat proses perencanaan, penganggaran dan monev yang cermat, tepat dan sesuai dengan tata waktu | * Mengusulkan pengadaan sarpras baru atau memperbaiki sarpras yang rusak melalui mekanisme yang telah ditetapkan. * Membangun sistem perencanaan dan pelaporan yang terintegrasi antara Dinas dan KPH. |
| 3. | Terlambat memperoleh data/ SPJ untuk penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan | Mennyiapkan SPJ sebelum batas waktu akhir penyerahan SPJ ke Subag Keuangan |
| 4. | Laporan keuanagan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku | Membuat SK Tim SAKIP dan melaksanakan SAKIP sesuai aturan yang berlaku |
| 5. | Masih rendahnya pemahaman tenaga perencana, korwil/ KPH tentang penyusunan program kegiatan sesuai dokumen perencana | Melakukan komunikasi awal mengenai koordinasi dan sinkronisasi kegiatan melalui telepon. Melakukan pembinaan ke KPH. |
| 6. | Rendahnya kesadaran dan pemahaman instansi terkait/ pemuka masyarakat terhadap pentingnya koordinasi dan sinkronisasi program anggaran kegiatan | Melibatkan instansi terkait dan pemuka masyarakat dalam setiap kegiatan musrenbanghut tingkat KPH dan dihadiri oleh perwakilan perencana |
| 7. | Rendahnya pemahaman ASN terhadap ISO dan SPIP | Melakukan sosialisasi ISO dan SPIP |
| 8. | Rendahnya kepedulian ASN terhadap ISO dan SPIP | Meningkatkan kepedulian melalui jam pimpinan |
| 9. | Tarif nonorarium ada perubahan setalah DPA disahkan, adanya perubahan dan penambahan personil eselon III/IV dan bendahara pengeluaran pembantu dalam Surat Keputusan Kepada Dinas terkait dengan pembayaran honornya | SDM harus memahami dan mengetahui standar terbaru yang dipakai dan membuat usulan perubahan anggaran terkait adanya perubahan dan penambahan personil eselon III/IV dan bendahara pengeluaran pembantu |

**BAB V**

**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang sudah dibangun, diperlukan informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan Rencana Tindak lanjut yang meliputi :

1. Kegiatan
2. Media cetak, Audio Visual
3. Peta dan Berita Acara
4. Diklat, Bintek
5. Kegiatan
6. Dokumen dan Peta
7. Sosialisasi/Diklat/Bimtek
8. Sosialisasi/Pengarahan
9. Surat
10. SOP, Undangan, Sosialisasi, Workshop implementasi
11. Arsip data, Telaah staf, Nota dinas
12. RKA
13. SPT
14. Papan Informasi, Booklet, Brosur dan Media elektronik
15. Undangan, Telp
16. Instruksi pimpinan, Perintah lisan
17. Membuat surat teguran
18. Laporan, Nota Dinas
19. Instruksi pimpinan, dokumen pengadaan
20. Instruksi pimpinan, momerandum, Nota Dinas
21. Media cetak, elektronik
22. Instruksi pimpinan, Dokumen Pengada
23. Surat undangan, sosialisasi, nota dinas
24. Surat pemberitahuan
25. Internet, Email

**BAB VI**

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan dengan efektif untuk mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan sudah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Dalam hal pemantauan dan evaluasi, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pemantauan dalam bentuk **Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah.**

Beberapa pemantauan berkelanjutan antara lain sebagai berikut:

1. Supervisi oleh atasan langsung
2. Rekonsiliasi data dan informasi oleh Bidang terhadap UPTD KPH untuk mengumpulkan data.
3. Pencermatan Peraturan Perundang-undangan sebelum melaksanakan semua kegiatan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi dan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya
5. Pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 oleh auditor internal Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
6. Pelaksanaan Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015

Beberapa evaluasi terpisah antara lain sebagai berikut :

* + - 1. Audit eksternal ISO 9001:2015 oleh auditor dari Lembaga Sertifikasi.
      2. Audit oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
      3. Audit oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
      4. Audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

**BAB VII**

**PENUTUP**

Pemantauan yang dilakukan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam Laporan Keuangan.

Demikian Rencana Tindakan Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ini dibuat, sebagai bahan pijakan untuk mengatasi pengendalian risiko.

**KEPALA DINAS KEHUTANAN**

**PROVINSI SUMATERA BARAT,**

**Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si**

**NIP. 19581029 198703 1 003**